

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, pada intinya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Tujuannya agar aturan tersebut berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua cara utama dalam implementasi kebijakan yaitu, langsung diimplementasikan dan melalui formulasi kebijakan. (Atika Marda Tillah *et al.*, 2023)

Tahap implementasi merupakan kunci keberhasilan sebuah kebijakan. Setiap kebijakan yang ingin berhasil harus melalui tahap pelaksanaan yang direncanakan dengan baik dan matang. Masyarakat harus ikut terlibat dalam semua tahap pembangunan desa, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Ketika merencanakan pembangunan, pemerintah harus melibatkan masyarakat sepenuhnya agar masyarakat sendiri yang menentukan masa depan desanya. (Jauhariah & Syamsudin, 2023)

Pembangunan bisa membawa perubahan baik dan buruk bagi masyarakat. Perubahan yang baik misalnya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sayangnya, kadang pembangunan tidak membawa perubahan yang berarti bagi sebagian masyarakat. Pembangunan bukan sekedar terjadi di kota besar, namun pula di desa-desa. Setiap tahun, desa menerima alokasi dana dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang dapat hidup dengan seimbang, baik secara materi maupun spiritual. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan juga hubungan sosial yang harmonis. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang adil ketika semua warga mempunyai peluang yang setara guna mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup yang layak. Kesejahteraan tidak hanya tentang

memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk berkembang secara optimal.

Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan warganya. Selain itu, pemerintah desa juga harus dipercaya oleh pemerintah yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten atau provinsi, karena mereka dapat memberikan dana untuk desa, seperti Dana Desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Kemajuan suatu desa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan warga pada proses pembangunan. Desa yang maju adalah desa di mana masyarakatnya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. (Yupita & Juita, 2020)

Desa Prajegan yakni terletak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Gegeran di sebelah barat Desa Gegeran, Desa Serangan di batas timur, Desa Kedung Banteng di batas utara, dan Desa Gelang Lor di batas selatan. Desa ini seluas 626,7 Ha jumlah penduduk 6.225 terdiri dari 2.340 KK. Dimana terdapat potensi desa termasuk lapangan yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah desa untuk dijadikan satu diantara destinasi desa yang disebut taman desa. Dalam mengembangkan beragam potensi yang dimiliki Desa Prajegan Pemerintah Desa Prajegan menginginkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya lewat pembangunan taman desa yang diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat desa.

Dalam pembangunan taman desa tersebut terdapat perencanaan dari kepala desa yang disebut RPJM Desa. RPJM desa merupakan visi misi yang dibuat oleh kepala desa yang akan digunakan selama masa jabatan menjadi kepala desa. Proses perancangan RPJM Desa mendapat persetujuan dari beberapa pihak seperti BPD, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat dan semua lembaga yang ada termasuk juga perangkat desa. Selain dari RPJM Desa terdapat item-item lain seperti RKP desa atau Rancangan Kerja Pemerintah

desa yang disusun setiap setahun sekali. Selanjutnya diperinci lagi di APB-Des disitu dokumen yang berisikan tentang rincian dana yang digunakan untuk pembangunan taman desa. Pembangunan taman desa ini sudah diatur didalam aturan Desa Prajegan Nomor 11 Tahun 2019 yaitu terkait pendanaan kegiatan pembangunan tahun jamak/*multiyear* Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2025.

RPJM Desa dibuat dengan melibatkan seluruh warga desa melalui musyawarah. Tujuan dari rencana pembangunan desa ini adalah untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus menjaga keselarasan dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten. Tujuan utama RPJM Desa Prajegan adalah untuk melanjutkan dan memperbaiki pembangunan desa. Rencana ini dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di desa serta diharap dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar semua pihak yang terlibat dalam pembangunan.

RPJM-Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 2019-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan kelanjutan dan pembaruan dari tahap sebelumnya. Dokumen ini disusun untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang spesifik di Desa Prajegan. Dengan adanya RPJM-Desa, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang lebih efisien serta integrasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan (*stakeholder*).

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut pemerintah Desa Prajegan mengembangkan potensi yang dimilikinya, memutuskan untuk membangun sebuah taman desa dimana dulunya merupakan sebuah lapangan kosong yang tidak terurus. Dalam menyikapi hal ini Pemerintah Desa Prajegan mengalihfungsikan lapangan terbengkalai tersebut disulap menjadi taman desa yang diharapkan menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat Desa Prajegan.

Taman desa atau disebut juga “*Taman Sumringah*” yang sesuai dengan Branding Desa Prajegan yaitu “*Prajegan Sumringah*”. Maka peran pemerintah dan masyarakat desa sangat berpengaruh untuk mengembangkan potensi desa yang ada di Desa Prajegan ini. Fasilitas yang disediakan di Taman Desa Prajegan yakni menyediakan café, area jogging track, tempat permainan anak, taman lampion, spot selfie dan disediakan lapak untuk para pedagang. Pemerintah Desa Prajegan berinisiatif yakni setiap sebulan sekali mengadakan penampilan budaya yang dimiliki Desa Prajegan seperti kesenian ketoprak Ngesti Budhoyo, kesenian Gajah Ki Hasan Rifa'i, reog singo taruno mudo, kesenian angklung Suryo Pandhowo, dan ludruk Irama Muda. Dalam acara tersebut Pemerintah Desa memiliki kerjasama dengan pihak Djarum 76, seperti mengadakan acara “76 pasar hepiii” dengan beberapa acara seperti pasar rakyat, volly hepiii, njagong budaya, *live music*, dan *community Meet Up* yang diadakan di Taman Sumringah Desa Prajegan. Kegiatan ini menjadi ajang promosi kepada khalayak umum.

Pemerintah Desa Prajegan tidak hanya fokus pada seni, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang berminat dalam olahraga, terutama bola voli. Selain itu, terdapat Media Kreatif Desa (MKD) yang dikelola oleh anggota karang taruna. Media Kreatif Desa Prajegan bertugas mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan membagikannya melalui media sosial seperti *facebook*.

Manfaat dalam pembangunan taman desa ini tentunya memberi dampak positif dan negatif bagi para masyarakat. Pembangunan taman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Desa Prajegan. Dalam meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan di Desa di taman desa ini disediakan stand agar dapat digunakan oleh warga sekitar. Disediakan juga tempat bermain anak dimana tempat bermain tersebut memberdayakan para pemuda sehingga membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

Gambar 1. 1 Site Plan Taman Desa



Sumber : Facebook Prajegan Sumringah

Fasilitas-fasilitas yang disediakan juga mulai bertambah sehingga membuat taman Desa Prajegan menjadi lebih nyaman untuk di kunjungi. Seperti disediakan gazebo/cakruk yang bisa digunakan para pengunjung untuk sekedar duduk santai dan café yang banyak diminati oleh kalangan anak muda dan bapak-bapak. Ditambah lagi dengan adanya pertunjukan kesenian yang diadakan sebulan sekali. Namun, sayangnya kegiatan tersebut tidak serutin pada saat awal pembangunan taman desa ini. Menjadikan aktivitas di dalam taman desa berkurang.

Pembangunan taman desa ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian dari masyarakat desa prajegan merasa kurang setuju dengan adanya pembangunan taman desa. Dikarenakan masih ada infrastruktur desa yang masih perlu dibenahi contohnya seperti aspal jalan. Jalan yang dipakai warga untuk beraktivitas sehari-hari bisa dibilang tidak layak untuk dilewati dikarenakan aspal yang sudah sangat rusak, sehingga beberapa RT warga sekitar berinisiatif untuk “menguruk” jalan tersebut menggunakan tanah lempung. Selain itu terdapat kendala lainnya seperti pendanaan yang terbatas

dikarenakan unit usaha yang ada di taman tidak semua mempunyai keuntungan yang besar. (Ihwanudin *et al.*, 2023)

Disamping dengan pro kontra yang ada, pembangunan taman desa prajegan atau yang disebut alun-alun sumringah ini secara tidak langsung meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sebagian masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya penjual yang ada di taman desa ini. Omzet dari para penjual bisa sekitar Rp. 20.000-100.000 untuk per-harinya. Dan untuk hari-hari tertentu seperti malam minggu atau acara-acara besar bisa mencapai Rp. 200.000 keatas. Dilihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan taman ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Prajegan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan taman di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pembangunan ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui observasi langsung, peneliti menemukan sejumlah temuan menarik yang mendorong minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Prajegan dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari analisis masalah yang ada, sehingga bisa dirumuskan yakni :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan taman desa di desa prajegan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berlandaskan masalah yang sudah dijabarkan, tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan taman desa di Desa Prajegan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan kebijakan tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharap setelah adanya studi ini akan menghasilkan pengetahuan baru terkait implementasi kebijakan pembangunan taman Desa Prajegan. Selain itu, penelitian ini juga bisa memberikan pengetahuan baru untuk universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh untuk penelitian serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Menjadi tugas terakhir mahasiswa guna menamatkan kuliah di program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan untuk memperluas pengetahuan peneliti.

- b. Bagi pemerintah yang ada di Desa Prajegan

Keberadaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus

masukannya yang berguna bagi pemerintah desa dalam melaksanakan implementasi kebijakan pembangunan taman desa.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Pembangunan

Menurut Alexander (1994) dalam (Hidayat *et al.*, 2022), pembangunan (development) merupakan suatu proses perubahan yang mencakup berbagai aspek dalam sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Riggs (1996) yang menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya terbatas pada satu dimensi, melainkan melibatkan perubahan holistik dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, dalam (Hidayat *et al.*, 2022), dikutip Ginandjar, menyatakan bahwa pembangunan harus didasarkan pada orientasi nilai yang menguntungkan (*favourable value orientation*). Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya menjadi proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik—yakni memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat—tetapi juga harus mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat.

2. Taman Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008. Taman desa didefinisikan sebagai area terbuka yang memiliki fungsi sosial serta estetika, dan juga berperan dalam menyediakan ruang untuk kegiatan rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat. Taman ini diwajibkan memenuhi standar tertentu terkait fasilitas dan kenyamanan yang disediakan.

Taman desa adalah ruang publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, sosial dan budaya bagi warga desa. Taman desa bermaksud membuat lingkungan yang lebih hijau juga sehat serta memberikan akses bagi masyarakat untuk beraktivitas di ruang terbuka. Taman desa yakni area yang

disediakan pemerintah desa guna dipakai masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan sedukasi. Taman desa ini juga bisa berfungsi sebagai pelengkap dari program penghijauan dan pelestarian.

3. Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa, atau yang dikenal dengan sebutan desa adat (atau nama lainnya), merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ciri khas pedesaan dapat dianalisis melalui berbagai kajian yang membahas perbedaan antara kehidupan masyarakat kota dan desa, yang dilihat dari faktor-faktor geografis, tradisi, serta sifat-sifat khas yang dimiliki oleh keduanya. Menurut Roucek dan Warren dalam (Agustina, 2022), karakteristik masyarakat sebagai berikut :

- 1) Kelompok primer memainkan peran yang sangat signifikan.
- 2) Faktor geografis memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kelompok masyarakat.
- 3) Hubungan antar individu cenderung lebih homogen.
- 4) Struktur masyarakat lebih bersifat seragam.
- 5) Tingkat mobilitas sosial relatif rendah.
- 6) Fungsi keluarga lebih difokuskan sebagai unit ekonomi.

4. Pemerintah desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai hal terkait dengan pemerintah desa di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (2),

"Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam struktur pemerintahan desa, terdapat kepala desa dan perangkat desa yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dengan tetap memperhatikan asal-usul serta adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012: 96-97) dalam (Fathony *et al.*, 2019) Kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, serta memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan tentram, baik secara fisik maupun mental

Kesejahteraan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dapat diukur melalui kualitas hidup mereka. Tingkat kesejahteraan ini ditunjukkan oleh penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, pendapatan yang lebih baik, tingkat pendidikan yang tinggi, serta peningkatan produktivitas di kalangan masyarakat.

F. LANDASAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Guna mengoptimalkan kebijakan itu, dibutuhkan sebuah studi terkait implementasi kebijakan. (Jehdeng, 2021)

Menurut George C Edward III (1980) implementasi kebijakan di bedakan menjadi 4 variabel yaitu:

1) Komunikasi

Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain:

Transmisi, komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan pelaksanaan. Sayangnya, seringkali pesan asli berubah saat melewati banyak tingkatan birokrasi sehingga terjadi kesalahpahaman.

Kejelasan, dalam komunikasi sangat penting, di mana informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus disampaikan dengan jelas dan tidak membingungkan, serta bebas dari ambiguitas agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar, hal yang diucapkan harus jelas, tidak bermakna ganda, dan konsisten.

Konsistensi, Perintah yang tidak konsisten hanya akan memunculkan kegundahan bagi pekerja di lapangan.

Informasi yang disampaikan harus kredibel, pas, dan konsisten. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Desa Prajegan ini didalamnya terdapat transfer

pengetahuan yang diperlukan untuk membantu pemerintah Desa Prajegan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan agar lebih konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan taman tersebut.

2) Sumber Daya

Di dalam Agustino (2012:151) Edward III menyebutkan bahwa sumber daya itu terdiri dari beberapa bagian, yakni:

Staf, merupakan aset penting dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, kekurangan atau ketidakmampuan staf dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Informasi dalam konteks implementasi kebijakan mencakup dua aspek utama: pertama, informasi yang menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan; dan kedua, data yang menunjukkan sejauh mana para pelaksana menaati aturan dan UU yang telah disahkan. (Sutmasa, 2021)

Anggaran, dalam pelaksanaan kebijakan anggaran penting untuk memastikan kecukupan modal atau investasi untuk suatu program atau kebijakan guna menajmi keberhasilan implementasinya. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuannya.

Fasilitas, ini juga memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun para pelaksana mungkin memiliki jumlah staf yang cukup dan memiliki otoritas untuk menjalankan tugas mereka, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan terhambat jika didukung oleh fasilitas yang memadai.

3) Disposisi atau sikap

Karakter seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam melaksanakan kebijakan. (Puguh, 2019)

Menurut Edward III, hal-hal yang harus diperhatikan dari sikap atau sifat seorang pelaksana kebijakan adalah:

Pengangkatan birokrat, Jika pegawai tidak memiliki komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, maka akan timbul berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Insentif, Edward menyarankan penggunaan insentif untuk memotivasi para pelaksana kebijakan. Mengingat manusia cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, maka pemberian insentif dapat menjadi cara efektif untuk mendorong Pemerintah Desa Prajegan meningkatkan kualitas pembangunan taman.

4) Struktur Organisasi

Pada tiap organisasi memiliki aturan yang harus diikuti oleh semua pelaksana, yang dikenal dengan sebutan SOP (Standard Operating Procedures). SOP berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arahan kepada setiap implementor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

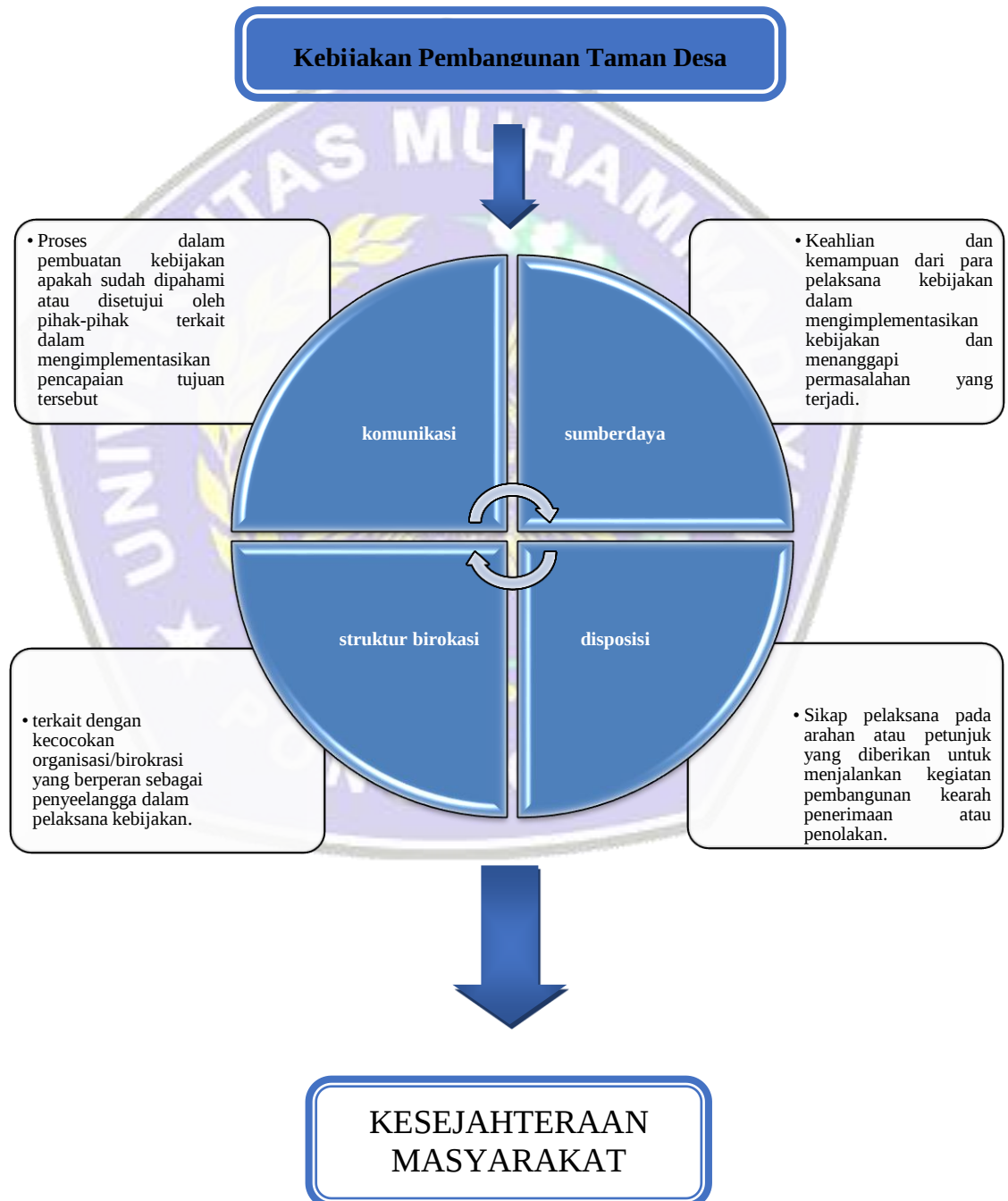
Edward III menyoroti bahwa sumber daya merupakan tulang punggung pada penerapan keputusan. Tanpa sumber daya yang memadai, bahkan kebijakan yang paling baik pun akan sulit diimplementasikan. (Sasmitha, 2022)

Struktur birokrasi dalam Kebijakan Pembangunan Taman Desa Prajegan melibatkan beberapa elemen. Kepala desa berperan sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan kegiatan, dibantu oleh BPD yang menyepakati rencana dan menampung aspirasi masyarakat. Sekretaris desa bertugas pada administrasi dan penyusunan laporan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komunikasi yang baik serta ketaatan pada SOP yang sudah diputuskan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam definisi operasional penelitian ini menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan pembangunan taman desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo :

Gambar 1. 2 Definisi Operasional



Menurut Edward III, keberhasilan suatu kebijakan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti cara kita menyampaikan kebijakan, sumber daya yang kita punya, sikap para pelaksana, dan struktur organisasi. Semua faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Keempat variabel ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas bagaimana proses kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa Prajegan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan taman desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

H. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini demi mendapatkan data yang tepat dari kondisi yang terjadi sebenarnya demi memperoleh data kongkrit yang terjadi di lapangan. Berikut metode yang digunakan :

1) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif dengan metode observasi langsung untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan pandangan Creswell (2008), penelitian ini merupakan sebuah proses bertahap yang dimulai dengan identifikasi masalah dan bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam.

Creswell (dalam Imam Gunawan 2013: 82) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga bertujuan untuk menginterpretasi data tersebut dalam rangka membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena sosial. Pendekatan ini dapat berfokus pada makna subjektif yang dibangun oleh individu atau kelompok, atau pada proses sosial yang lebih luas. (Pratama, 2017)

2) Lokasi penelitian

Lokasi pengamatan berlangsung di Desa Prajegan tepatnya di taman Desa Prajegan yang disebut Alun-Alun Sumringah dan BUMDes karena dekat dengan taman dan sebagai pengelola taman desa. Alasan pemilihan lokasi ini sebab peneliti berasumsi Pemerintah Desa Prajegan membuat suatu kebijakan yang dinilai peneliti menarik sehingga menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana *“Impelementasi Kebijakan Pembangunan Pembangunan Taman Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*.

3) Teknik penentuan informan/subjek penelitian

Subjek penelitian mencakup kepala desa Prajegan serta aparat desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu untuk memilih informan yang relevan dan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai kebijakan tersebut. Informan yang dipilih meliputi aparat desa yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan taman desa. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implelementasi kebijakan yang diterapkan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan taman desa (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Berikut informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini yang dimaksud adalah :

1. Bapak Timbul selaku Kepala Desa Prajegan
2. Bapak Sutrisno sebagai Kepala Seksi Pemerintahan
3. Bapak Aris Sunarko selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa Prajegan Sumringah (BUMDes) sebagai pengelola taman

4. Bapak Andri Arista Ramadhona selaku ketua karang taruna
5. Masyarakat Desa Prajegan

4) Teknik pengumpulan data

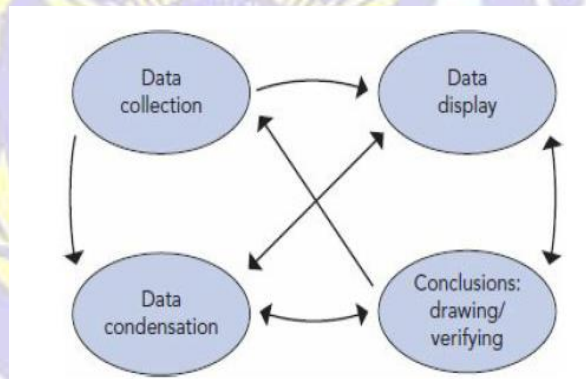
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dari responden melalui pertanyaan terbuka, memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan pandangan dan pengalaman mereka secara rinci. Data yang diperoleh dari teknik ini akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan temuan-temuan yang relevan (Deal, 2017). Metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara : Dalam segi metode mengumpulkan data melalui wawancara, poin penting pada penetapan *key-informan* yang menjadi sumber data akan dilaksanakan, disini yang menjadi objek penelitian adalah bapak Timbul sebagai Kepala Desa, bapak Aris Sunarko sebagai ketua Bumdes Prajegan Sumringah, bapak Sutris sebagai Kaur Kesejahteraan, Bapak Aris selaku Ketua Karang Taruna, dan beberapa masyarakat Desa Prajegan
- b) Observasi : Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat perilaku subjek dan objek, atau kejadian, secara sistematis tanpa melibatkan pertanyaan. Dalam observasi, peneliti mengamati secara langsung dan mencatat segala hal yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan fokus pada aspek yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
- c) Dokumentasi : Dalam penelitian ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan wawancara dalam pengambilan data diabadikan menggunakan kamera.

5) Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan ini, data yang dianalisis berupa informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang tidak berupa digit angka, dan fokus pada pemahaman serta penjabaran makna yang terkandung di dalamnya. Data tersebut kemudian dikelompokkan untuk memudahkan pemilihan antara data yang dibutuhkan dan yang tidak. Selain itu, data dijabarkan dalam bentuk teks untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi (Hafiza, 2023). Menurut Miles dan Humberman terhadap analisis data sebagai berikut :

Gamabar 1. 3 Analisis Data Model Miles Huberman & Saldana



Sumber (Miles *et al.*, 2014)

a) *Data Collection*

Data Collection (pengumpulan data) adalah mengumpulkan informasi dari berbagai tempat untuk mengetahui sesuatu secara benar. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu. (Yunitasari *et al.*, 2022)

b) *Data condensation*

Data Condensation (penyaringan) diartikan sebagai cara kita memilih bagian-bagian penting dari catatan lapangan, menyederhanakannya, dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami.

c) *Data Display*

Data Display proses mengubah data mentah menjadi format yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuan utama data *display* adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan ringkas, sehingga pengguna data dapat dengan mudah memahami maknanya dan mengambil keputusan yang tepat. (Sutriani & Octaviani, 2019)

d) *Conclusions : drawing/verifying*

Adapun dalam penelitian ini untuk mengarah pada hasil dari kesimpulan yaitu dalam menganalisis data lapangan yang diperoleh dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan tersebut dapat menemukan hal-hal baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya.. (Setyawan et al., 2021)

6. Teknik Uji Keabsahan data

Untuk menjamin keandalan (*trustworthiness*) data, diperlukan teknik validasi yang tepat. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai keandalan data adalah uji keterbasahan, yang berperan penting dalam memverifikasi validitas dan keandalan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Metode triangulasi dipilih untuk penelitian ini karena melibatkan penggunaan berbagai sumber data, seperti wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa silang temuan penelitian dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari

berbagai sumber atau menggunakan metode yang berbeda (Adhimah, 2020) Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi keabsahan data dengan menggunakan sumber tambahan di luar data utama untuk tujuan perbandingan atau pemeriksaan. Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan oleh peneliti didasarkan pada kerangka Denzin, yang mencakup tiga jenis triangulasi sebagai teknik validasi untuk memastikan akurasi data, diantaranya:

- a. Triangulasi data: Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen dan arsip dari Desa Prajegan yang diperoleh selama wawancara, untuk memeriksa dan memvalidasi informasi yang terkumpul.
- b. Triangulasi teori: Peneliti menggunakan teori-teori tertentu untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi kriteria yang relevan. Dalam penelitian ini, teori yang dijelaskan dalam bab pembahasan digunakan untuk menguji serta memastikan kesahihan data yang terkumpul.
- c. Triangulasi metode: Peneliti menggunakan berbagai metode, seperti wawancara dan dokumentasi, untuk memperoleh data yang lebih valid. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama dengan analisis dokumen yang diperoleh dari beberapa informan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. (Dalimunthe & Susilawati, 2022)